PROFIL POTENSI DAN PELUANG INVESTASI SUB SEKTOR PERTANIAN (KOMODITI KEDELAI)

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

PUSAT PERIZINAN DAN INVESTASI
DEPARTEMEN PERTANIAN
2007

PROFIL POTENSI DAN PELUANG INVESTASI SUB SEKTOR PERTANIAN (KOMODITI KEDELAI)

PUSAT PERIZINAN DAN INVESTASI
DEPARTEMEN PERTANIAN
2007

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Pertumbuhan permintaan kedelai selama 15 tahun terakhir cukup tinggi, namun tidak mampu diimbangi oleh produksi dalam negeri, sehingga harus dilakukan impor dalam jumlah yang cukup besar. Harga kedelai impor yang murah (terutama dari Amerika Serikat) dan tidak adanya tarif impor menyebabkan tidak kondusifnya pengembangan kedelai di dalam negeri.

Prospek pengembangan kedelai di dalam negeri untuk menekan impor cukup baik, mengingat ketersediaan sumberdaya lahan yang cukup luas, iklim yang cocok, teknologi yang telah dihasilkan, serta sumberdaya manusia yang cukup terampil dalam usahatani. Disamping itu, pasar komoditas kedelai masih terbuka lebar.

Untuk menekan laju impor diperlukan strategi peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, peningkatan efesiensi produksi, penguatan kelembagaan petani, peningkatan kualitas produksi, peningkatan nilai tambah, perbaikan akses pasar, perbaikan sistem permodalan, pengembangan infra-struktur, serta pengaturan tata niaga dan insentif usaha.

Untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, dengan sasaran peningkatan produksi 15% pertahun, sasaran produksi 60% dicapai pada tahun 2009 dan swasembada baru tercapai pada tahun 2015. Untuk mendukung upay khusus peningkatan produksi kedelai tersebut diperlukan investasi sebesar Rp. 5,09 trilyun (2005-2009) dan Rp. 16,19 trilyun (2010 - 2025). Dalam periode yang sama, investasi swasta diperkirakan masing-masing sebesar Rp. 0,68 trilyun dan Rp. 2,45 trilyun.

Profil ini berisikan mengenai potensi produksi komoditi kedelai, potensi pasar/komsumsi , peluang pengambangan, alat analisa yang dapat digunakan untuk menentukan apakah investasi tersebut layak untuk dilakukan atau tidak serta sumber-sumber pembiayaan investasi.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penulisan profil ini kami mengucapkan terima kasih, diharapkan kiranya profil ini dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama para investor baik dalam negeri maupun luar negeri.

Jakarta, April 2007

Dr. Moehammad Dany
NIP 330 002 728

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR. i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

I.1 Latar Belakang 1

I.2 Maksud dan Tujuan 2

BAB II PERKEMBANGAN KINERJA KOMODITI JAGUNG 3

BAB III POTENSI PRODUKSI 5

III.1 Perkembangan Produksi, Luas Area 5

III.2 Sentral Produksi 7

BAB IV POTENSI PASAR/KOMSUMSI 9

BAB V PELUANG PENGEMBANGAN 11

BAB VI ANALISA EKONOMI KELAYAKAN INVESTASI 13

BAB VII SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN INVESTASI 17

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kedelai atau kacang kedelai *(Glicine max)* adalah salah satu tanaman polong-polongan yang merupakan tanaman pangan terpenting ketiga setelah padi dan jagung. Kandungan gizi biji kedelai cukup tinggi, terutama kandungan proteinnya mencapai ± 34% dan aromanya disukai sehingga sangat diminati sebagai bahan pangan maupun sebagai pakan ternak. Sebagai bahan pangan kedelai banyak dikonsumsi dalam bentuk tempe, tahu, kecap, tauco, susu kedelai, oncom, yogurt, mentega, minyak, keripik, tackoa, tauge, dll. Konsumsi kedelai per kapita meningkat dari 8,13 kg pada tahun 1998 menjadi 8,97 kg pada tahun 2004.

Pertumbuhan permintaan kedelai cukup tinggi, namun tidak mampu diimbangi oleh produksi dalam negeri, sehingga harus dilakukan impor dalam jumlah yang cukup besar. Harga kedelai impor yang murah dan tidak adanya tarif impor menyebabkan tidak kondusifnya pengembangan kedelai di dalam negeri.

Serta dapat diupayakan melalui berbagai strategi, yaitu peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, peningkatan efisiensi produksi, penguatan kelembagaan petani, peningkatan kualitas dan nilai tambah produk, perbaikan akses pasar dan sistem permodalan, pengembangan infrastruktur, serta pengaturan tataniaga dan insentif usaha.

Agar produksi kedelai dan produk olahannya mampu bersaing di pasar, maka mutunya perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pembinaan terhadap pengembangan proses produksi, pengolahan dan pemasaran, khususnya penerapan jaminan mutu memegang peranan penting dan perlu mendapat prioritas dalam pembangunan pertanian nasional.

Dalam pemasaran kedelai, petani umumnya berada dalam posisi tawar yang lemah, sehingga harga kedelai di tingkat petani lebih banyak ditentukan

oleh pedagang. Oleh karena itu, harga riil di tingkat produsen (petani) cenderung menurun. Dalam pengembangan kedelai ke depan diperlukan perbaikan tataniaga dari produsen hingga konsumen.

Agar memiliki daya saing yang tinggi, pengembangan kedelai diarahkan pada peningkatan produksi, perbaikan kualitas dan dayaguna produk olahan yang mampu bersaing dengan produk olahan dari bahan baku non kedelai. Disamping itu, diperlukan dukungan kebijakan yang dapat melindungi harga kedelai dalam negeri dan kebijakan pemberlakuan tarif impor serta pembatasan jumlah impor.

1.2 Maksud dan Tujuan

Memberikan informasi bagi calon investor tentang potensi dan peluang investasi sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan untuk berinvestasi. Pengembangan dan Peluang investasi ini diharapkan dapat terlaksana secara optimal sehingga dapat diwujudkan agribisnis kedelai yang mampu memenuhi kebutuhan baik petani langsung maupun industri.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB II
PERKEMBANGAN KINERJA TANAMAN PANGAN (KEDELAI)

Pada tahun 1970 sampai dengan 2006 luas panen kedelai Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup berfluktuasi dengan rata-rata laju pertumbuhan mencapai 0,58 persen per tahun. Provinsi-provinsi di Jawa memberikan kontribusi sebesar 65,20 persen terhadap total luas panen Indonesia, sedangkan provinsi di luar pulau Jawa hanya 34,80 persen.

Peningkatan luas panen yang cukup pesat terjadi selama kurun waktu tahun 1970 hingga tahun 1992. Dalam periode tersebut rata-rata pertumbuhan luas panen kedelai mencapai 4,98 persen per tahun dengan luas panen tertinggi terjadi pada tahun 1992 yaitu sebesar 1,67 juta hektar.

Secara umum perkembangan luas panen kedelai cenderung lebih fluktuatif di luar Jawa dibandingkan di Jawa. Meskipun total luas panen lebih tinggi di Jawa, namun rata-rata pertumbuhan luas panen di luar Jawa lebih besar dari pada di Jawa. Pada thun 1970-1992 rata-rata pertumbuhan luas panen di luar Jawa sebesar 11,30 persen per tahun, sedangkan di Jawa hanya sebesar 2,69 persen per tahun.

Hal ini terkait dengan berbagai upaya Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan kedelai melalui pelaksanaan beberapa program pengembangan agribisnis kedelai.

Pada tahun 1984-1988 Pemerintah menggalakkan pengembangan kedelai antara lain melalui program menuju swasembada kedelai, program pengembangan kedelai di lahan masam (pengapuran), penerapan anjuran teknologi, penggunaan pupuk biohayati , dan lain-lain. Tingginya perhatian Pemerintah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan dan petani mulai bergairah

menanam kedelai. Hal tersebut terlihat dengan berkembangnya luas areal pertanaman kedelai di sebagian daerah khususnya di luar Jawa.

Setelah tahun 1992 kondisi tersebut berubah dengan drastis. Setiap tahun terjadi penurunan luas panen kedelai dengan rata-rata penurunan mencapai 6,33 persen per tahun. Tahun 2006 luas panen kedelai hanya tinggal 0,60 juta hektar. Hal ini mengindikasikan bahwa keinginan petani menanam kedelai menurun. Banyak faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut, baik dari faktor hulu, "on farm" maupun hilir. Semua faktor penyebab tersebut sangat berkaitan erat dan saling mempengaruhi. Petani akan bergairah menanam kedelai jika budidaya bertanam kedelai dianggap menguntungkan, jika sarana produksi tersedia dengan kondisi yaitu tepat jumlah, jenis/varietas, mutu, harga, dan lokasi, serta dapat melaksanakan anjuran paket teknologi dengan tepat.

Disamping itu kebijakan harga dan impor kedelai juga merupakan faktor kunci utama yang mempengaruhi gairah petani untuk menanam kedelai. Kebijakan tata niaga impor kedelai, yang menyebabkan masuknya kedelai impor dengan harga murah, menyebabkan petani kita sulit untuk bersaing.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB III
POTENSI PRODUKSI

III.1 Perkembangan luas panen, produktivitas dan produksi

Data Statistik Departemen Pertanian menunjukkan bahwa luas areal panen kedelai terus meningkat dari 0,53 juta ha pada tahun 2003 menjadi 0,62 juta ha pada tahun 2005 dengan laju kenaikan 92% per tahun, sedangkan untuk hasil produksi juga mengalami kenaikan 91% per tahun yaitu 0,67 juta ton pada tahun 2003 menjadi 0,80 juta ton pada tahun 2005, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel -1. Perkembangan produksi dan luas panen komoditas kedelai

No.	Provinsi	Tahun								
		2003			2004			2005		
		Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Qu/Ha)	Produksi Ton	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Qu/Ha)	Produksi Ton	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Qu/Ha)	Produksi Ton
1	NAD	14.519	12,88	18.697	24.325	12,81	31.170	24.189	12,84	31.067
2	Sumut	9.910	10,56	10.466	11.706	10,54	12.333	13.787	11,45	15.793
3	Sumbar	1.613	13,16	2.122	1.178	13,37	1.575	1.505	13,29	2.000
4	Riau	1.423	10,11	1.438	1.781	10,25	1.825	2.829	10,33	2.923
5	Jambi	2.912	13,71	3.992	1.815	13,95	2.532	2.191	13,07	2.863
6	Sumsel	3.977	12,11	4.815	3.539	13,18	4.664	3.796	13,59	5.160
7	Bengkulu	2.309	9,02	2.083	3.309	9,23	3.053	2.725	9,26	2.522
8	Lampung	4.231	10,30	4.360	5.139	10,48	5.388	4.110	11,43	4.699
9	Bangka Belitung	3	10,00	3	-	-	-	-	-	-
10	Riau Kep	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	14.971	13,24	19.822	20.997	13,85	29.090	17.934	13,30	23.845
13	Jawa Tengah	98.163	14,50	142.315	79.557	14,31	113.852	115.368	14,48	167.107
14	DIY	36.327	9,79	35.562	33.552	10,65	35.729	33.297	10,41	34.670
15	Jawa Timur	222.433	12,91	287.205	246.940	12,92	318.929	255.443	13,12	335.106
16	Banten	2.452	13,23	3.245	3.430	13,41	4.601	1.832	13,63	2.497

17	Bali	5.765	13,59	7.834	7.958	13,99	11.131	8.002	14,03	11.225
18	NTB	64.608	11,81	76.333	75.658	12,09	91.495	89.230	11,96	106.682
19	NTT	3.571	11,29	4.032	2.308	10,26	2.368	2.093	10,45	2.188
20	Kalbar	1.020	11,22	1.144	1.063	11,58	1.231	1.194	11,30	1.349
21	Kalteng	1.429	10,80	1.544	1.070	10,86	1.162	757	10,46	792
22	Kalsel	5.055	12,66	6.400	4.382	12,38	5.423	2.118	12,05	2.552
23	Kaltim	2.087	11,29	2.357	2.074	10,40	2.157	2.034	12,93	2.629
24	Sulut	1.903	12,19	2.320	4.186	12,29	5.144	3.179	12,93	4.112
25	Sulteng	1.465	11,25	1.648	1.915	10,89	2.085	2.099	10,68	2.241
26	Sulsel	16.992	14,21	24.140	17.986	14,94	26.873	16.347	16,63	27.187
27	Sultengg	2.086	8,33	1.738	2.868	8,30	2.381	3.580	8,57	3.069
28	Gorontalo	541	10,02	542	934	13,74	1.283	2.907	13,89	4.039
29	Sulbar	-	-	-	-	-	-	447	14,34	641
30	Maluku	1.237	12,00	1.484	977	12,01	1.173	1.194	11,92	1.423
31	Maluku Utara	463	11,92	552	572	11,82	676	990	11,94	1.182
32	Papua	3.331	10,23	3.407	3.936	10,57	4.160	4.227	10,67	4.511
33	Irian Jaya Barat	-	-	-	-	-	-	2.137	10,66	2.279
	Indonesia	526.796	12,75	671.600	565.155	12,80	723.483	621.541	13,01	808.353

Sumber; Data Statistik 2006

Peningkatan produktivitas diupayakan dengan penggunaan benih unggul kedelai yang bermutu, penggunaan lahan-lahan yang sudah ada untuk menanam kedelai, termasuk penggunaan lahan-lahan tidur. Dilakukan juga upaya-upaya untuk meningkatkan kesuburan lahan, diantaranya dengan penggunaan pupuk organik, pupuk bio hayati, dan kapur pertanian.

Selain peningkatan produksi melalui penggunaan bibit bermutu dan perluasan areal, juga perlu mengupayakan suatu iklim yang kondusif, yang membuat petani bergairah menanam kedelai. Yakni dengan menciptakan suatu kondisi yang membuat petani akan mendapat nilai lebih yang cukup signifikan, bila menanam kedelai. Caranya, selain dengan memperketat ijin impor kedelai, juga dengan merangkul para pengusaha di sektor hilir untuk beralih dari kedelai impor lepada kedelai lokal.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Kedelai perlu terus ditingkatkan melalui beberapa cara, antara lain :

1) Memacu peningkatan produksi kedelai nasional melalui berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi serta menekan kehilangan hasil pada saat panen dan pasca panen.
2) Mendorong investasi di sektor budidaya kedelai.
3) Menerapkan tarif bea masuk yang fleksibel dan antisipatif terhadap fluktuasi kedelai internasional yang diperkirakan sebesar 30%.
4) Memfasilitasi kemitraan dengan agroindustri kedelai serta mendorong kerjasama petani kedelai dengan Inkopti/Mopti dan Importir.
5) Mengatur tata niaga impor kedelai melalui pemberlakuan "Importir Produsen" yang juga berperan sebagai "importir grower" yaitu importir yang juga memproduksi biji kedelai baik secara langsung (berusahatani kedelai) maupun tidak langsung (bermitra dengan petani).
6) Dalam upaya memberikan insentif bagi petani

III.2 Sentra Produksi

Produksi kedelai umumnya dihasilkan dari sentra-sentra produksi kedelai utama, yaitu seperti Jawa Timur (Banyuwangi, Pasuruan dan Lamongan), Jawa Tengah (Grobogan dan Wonogiri) Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat (Bima, Lombok Tengah dan Sumbawa). Sekitar 62% produksi kedelai nasional berasal dari pulau Jawa, dan propinsi Jawa Timur sebagai penghasil terbesar yang mencapai 43% dengan sentra produksi utama di Pasuruan, untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel-2. Sentra Produksi Kedelai

No.	Propinsi	Kabupaten
1.	Bali	Jembrana, Badung, Tabanan, Klungkung
2.	Jawa Tengah	Grobogan, Wonogiri
3.	KalTim	Berau, Kutai Timur
4.	SumSel	Lahat, OKU Timur, Banyuasin
5.	Bengkulu	Rejang Lebong, Mukomuko, Kaur
6.	SulSel	Bone, Soppeng, Wajo, Jeneponto
7.	NTB	Lombok Tengah, Bima, Sumbawa, Dompu
8.	KalSel	Tanah Laut, Kotabaru, Hulu Sungai Utara, Tabalong
9.	Jambi	Tanjab Timur, Tebo, Bungo, Merangin
10.	SumBar	Pasaman, Sijunjung, Solok, Pesisir Selatan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB IV
POTENSI PASAR/KONSUMSI

IV.1 Sentral Konsumsi

Produk kedelai sebagai bahan olahan pangan berpotensi dan berperan dalam menumbuhkembangkan industri kecil menengah bahkan berpelung pula sebagai komoditas ekspor. Agar produksi kedelai dan produk olahannya mampu bersaing di pasar, maka mutunya perlu ditingkatkan.

Kebutuhan kedelai pada tahun 2004 sudah mencapai 2,02 juta ton, sedangkan produksi dalam negeri baru 0,71 juta ton dan kekurangannya terpaksa diimpor. Hanya sekitar 35% dari total kebutuhan yang dapat dipenuhi dari prodksi dalam negeri, sisnya impor.

Perkembangan Konsumsi

Sebagai sumber protein nabati, kedelai umumnya dikonsumsi dalam bentuk produk olahan, terutama tahu, tempe, kecap, tauco, susu kedelai dan berbagai bentuk makanan ringan (snack). Sata statistik FAO menunjukkan bahwa kumsumsi kedelai per kapital dalam 15 tahun terakhir menurun dari 11,38 kg pada tahun 1990 menjadi 8,97 pada tahun 2004, dengan laju penurunan 1,69% per tahun.

Penurunan konsumsi terjadi sejak 1995. Selama periode 1995-2000, konsumsi per kapita menurun dari 11,82 kg pada tahun 1995 menjadi 10,92 kg pada tahun 2000, degan laju 1,57% per tahun. Penurunan paling tajam terjadi pada periode 200-2004, rata-rata 4,81% per tahun.

Secara Nasional, penurunan konsumsi kedelai jauh lebih rendah daripada penurunan produksi. Implikasinya, tanpa terobosan peningkatan produksi Indonesia akan menghadapi defisit yang makin besar. Dalam periode 1990-2004, volume impor kedelai terus meningkat, dari 0,54 juta pada tahun 1990 menjadi 1,31 jut ton pda tahun 2004 (tanel-1). Mengingat laju penurunan produksi kedelai lebih tajam daripada laju penurunan konsumsi, maka ke depan impor kedelai untuk menutupi defisit diperkirakan akan terus meningkat.

Tabel-3. Neraca produksi, konsumsi dan perdagangan kedelai di Indonesia, tahun 1990-2004

Tahun	Produksi (000ton)	Konsumsi (ton)	Defisit (000ton)	Impor (ton)	Ekspor (ton)	Net Impor (000ton)
1990	1.487	2.028	541	541	0,24	541
1991	1.555	2.228	673	673	0,27	672
1992	1.870	2.560	690	694	3,91	690
1993	1.709	2.431	723	724	0,75	723
1994	1.565	2.365	800	800	0,03	800
1995	1.680	2.287	607	607	0,08	607
1996	1.517	2.263	746	746	0,24	746
1997	1.357	1.973	616	616	0,01	616
1998	1.306	1.649	343	343	0,00	343
1999	1.383	2.684	1.301	1.302	0,02	1.302
2000	1.018	2.294	1.276	1.278	0,52	1.277
2001	827	1.960	1.133	1.136	1,19	1.135
2002	673	2.017	1.344	1.365	0,24	1.365
2003	672	2.016	1.343	1.193	0,43	1.192
2004	707	2.015	1.307	1.307	0,00	1.307
Pertumbuhan(%)	-5,17	-0,51	6,51	6,50	-	6,51

Sumber, FAO. 2004, diolah.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB V
PELUANG PENGEMBANGAN

Kedelai merupakan tanaman pangan terpenting ketiga setelah padi dan jagung. Komoditas ini kaya protein nabati yang diperlukan untuk meningkatkan gizi masyarakat, aman dikonsumsi dan harganya murah. Dari data yang didapat, biji kedelai yang utuh dapat diolah menjadi bermacam-macam produk olahan yang bernilai tinggi, hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar.1 Pohon Industri

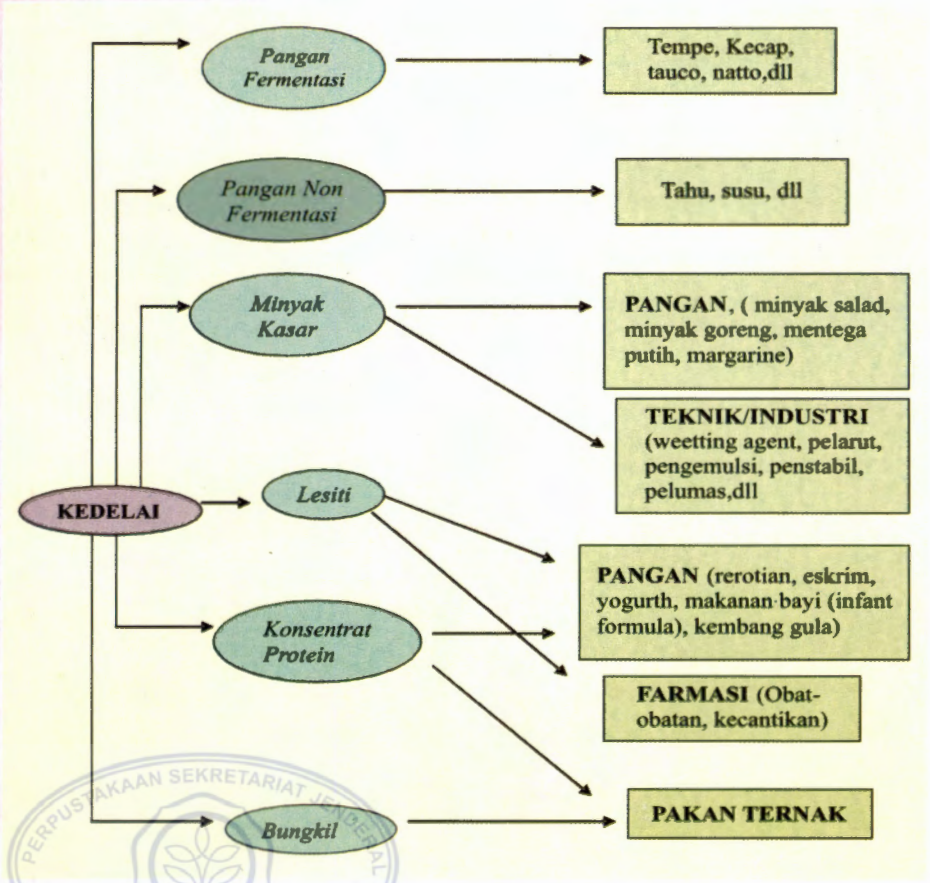

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Dari gambar diatas dapat terlihat bahwa Kedelai dapat diolah menjadi berbagai produk, baik produk pangan, obat-obatan, industri maupun pakan.

Produk olahan kedelai yang populer di masyarakat dewasa ini adalah produk fermentasi seperti tempe, kecap, tauco, dan produk nonfermentasi seperti tahu, susu, dan daging tiruan (meat analog).

Produk fermentasi lain yang populer adalah natto di jepang dan produk nonfermentasi lainnya seperti keju kedelai, yuba dan lain-lain. Produk lainnya dari kedelai adalah minyak kasar, isolat protein, lesitin, dan bungkil kedelai.Minyak kedelai dapat diolah lagi untuk produk pangan dan produk industri. Produk pangan yang menggunakan minyak kedelai antara lain adlah minyak salad, minyak goreng, mentega putih, margarine, dan mayonaise.

Isolat protein dan lesitin banyak digunakan dalam berbagai produk industri makanan, antara lain roti-rotian, es krim, yoghurt, makanan bayi (infant formula), kembang gula dan lain-lain. Bungkil kedelai yang mengndung protein tinggi adalah bahan baku penting rangsum ternak (pakan).

Di Indonesia, kedelai lebih banyak digunakan untuk tahu dan tempe. Berdasarkan perhitungan, kebutuhan kedelai untuk tahu dan tempe pada tahun 2002 mencapai 1,78 juta ton atau 88% dari total kebutuhan dalam negeri, sedangkan 12% sisanya untuk berbagai keperluan makanan olahan dan bahan baku industri lainnya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB VI
ANALISA EKONOMI KELAYAKAN INVESTASI

Penilaian kelayakan agroindustri merupakan suatu kegiatan lanjutan tak terpisahkan dari perencanaan kegiatan agroindustri. Dalam prakteknya, penilaian kelayakan usaha oleh pihak perencana (investor) lebih banyak didasarkan pada analisis financial setelah analisis agroindustri yang direncanakan dirasakan layak.

Evaluasi financial menggunakan rasio-rasio financial dasar yang umum digunakan dalam menentukan profitabilitas finansial. Parameter-parameter tersebut adalah:

a) Net Present Value (NPV)
b) Internal rate of return (IRR)
c) Return on investment (ROI) dan
d) Payback Period (PP)
e) Benefit Cost Ratio (Net B/C) dan Gross Benefit Ratio (Gross B/C)

Pada penulisan profil kedelai ini rasio financial yang digunakan adalah:

- Benefit Cost Ratio (Net B/C)

Keterangan dari masing-masing parameter tersebut sebagai berikut:

Benefit Cost Ratio (Net B/C) Net B/C adalah perbandingan antara tingkat keuntungan yang diperoleh dengan total biaya yang dikeluarkan. Suatu usaha dikatakan layak dan memerlukan manfaat apabila B/C > 0. Semangkin besar B/C semakin besar pula manfaat yang akan diperoleh dari usaha tersebut, yang diformulasikan sebagi berikut :

$$B/C = \frac{TK}{TB}$$

Di mana TK = Tingkat Keuntungan ; TB = Total Biaya

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sebagai contoh, dibawah ini disajikan perhitungan Hasil analisa Usaha Tani Komoditas Kedelai.

1. Milik Petani

ANALISA USAHA TANI KEDELAI PERHEKTAR

NO.	URAIAN	VOLUME		SATUAN BIAYA (RP)	JUMLAH BIAYA (RP)
A	**Tenaga Kerja**				
	- Penyiapan lahan	20	HOK	12.500	250.000
	- Penanaman	15	HOK	12.500	187.500
	- Pemupukan	5	HOK	12.500	62.500
	- Penyiangan	15	HOK	12.500	187.500
	- Penyemprotan	5	HOK	12.500	62.500
	- Pengairan	-	HOK	12.500	-
	- Panen	30	HOK	12.500	375.000
	- Pengangkutan	2	HOK	12.500	25.000
	- Penyimpanan	2	HOK	12.500	25.000
	- Lain-lain	-	HOK	12.500	-
	JUMLAH				**1.175.000**
B	**Saranan Produksi**				
	- Benih	50	Kg	6.550	327.500
	- Urea	30	Kg	1.400	42.000
	- SP 36	60	Kg	1.600	96.000
	- KCL	30	Kg	2.000	60.000
	- Pupuk Kandang	(mulsa jerami tan sebelumnya)			
	- Pestisida	1	Ltr	100.000	100.000
	JUMLAH				**625.500**
	JUMLAH A + B				**1.800.500**
	1. Total biaya produksi				1.800.500
	2. Total produksi *)	1.283	Kg		
	3. Harga jual	1.283	Kg	3.500	4.490.500
	4. Pendapatan bersih 3-1)				2.690.000
	5. R/C (3/1)				**2,49**

Ket :
- Harga kedelai = Rp 3.500/Kg
- Umur panen = 3 bln
- *) Rata-rata nasional Aram III BPS 2004

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

2. Sistem Sewa

ANALISA USAHA TANI KEDELAI PERHEKTAR

NO	URAIAN	VOLUME		SATUAN BIAYA (RP)	JUMLAH BIAYA (RP)
A.	**Tenaga Kerja**				
	- Penyiapan lahan	20	HOK	12.500	250.000
	- Penanaman	15	HOK	12.500	187.500
	- Pemupukan	5	HOK	12.500	62.500
	- Penyiangan	15	HOK	12.500	187.500
	- Penyemprotan	5	HOK	12.500	62.500
	- Pengairan	-	HOK	12.500	-
	- Panen	30	HOK	12.500	375.000
	- Pengangkutan	2	HOK	12.500	25.000
	- Penyimpanan	2	HOK	12.500	25.000
	- Lain-lain	-	HOK	12.500	-
	JUMLAH A				**1.175.000**
B.	**Sarana Produksi**				
	- Benih	50	Kg	6.550	327.500
	- Urea	30	Kg	1.400	42.000
	- SP 36	60	Kg	1.600	96.000
	- KCL	30	Kg	2.000	60.000
	- Pupuk kandang	(mulsa jerami tan sebelumnya)			
	- Pestisida	1	Ltr	100.000	100.000
	JUMLAH B				**625.500**
C.	**Lain-lain Pengeluaran**				
	- Sewa lahan	1	MT	-	500.000
	- Pajak	1	MT	-	25.000
	- Sumbangan				
	JUMLAH C				**525.000**
	JUMLAH A+B+C				**2.325.500**
	1. Total biaya produksi				**2.325.500**
	2. Total produksi *)	1.283	Kg		
	3. Harga jual	1.283	Kg		**4.490.500**
	4. Pendapatan bersih (3-1)				**2.165.000**
	5. R/C (3/1)				**1,93**

Ket :

- Harga kedelai = Rp 3.500/Kg
- Umur panen = 3 bln
- *) Rata-rata nasional Aram III BPS 2004

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB VII
SUMBER PEMBIAYAAN

Departemen pertanian pada tahun 2007 ini membuat rencana pembangunan pertanian. Pada tahun 2007 ini Departemen Pertanian memiliki 27 kegiatan dan didalamnya terdapat 4 kegiatan utama yaitu :

1. Pemberian subsidi bunga modal investasi, yang terakhir dikenal dengan Bantuan Langsung Masyarakat - Kredit Investasi Pertanian (BLM-KIP)
2. Pemberian jaminan kredit pertanian sehingga tidak ada agunan dengan demikian petani lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman yang dikenal dengan Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3).
3. Pembentukan dan pengaktifan lembaga tani. Direncanakan pada tahun 2007 ini akan dibangun Gabungan Kelompok Tani dengan sasaran 200 pedesaan sehingga ditargetkan dalam 1 desa ada 1 Gapoktan dan 1 penyulih
4. Pemberian subsidi benih. (Majalah FOKUS AGRIBIZ VOL. 03 No 03 tahun 2006)

A. Program SKIM SP3 (Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian)

Untuk kegiatan yang telah berjalan salah satunya yaitu Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3). Pembentukan Skim SP-3 ini dilatar belakangi dorongan untuk peningkatan kinerja usaha dibidang pertanian sehingga secara simultan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga petani/peternak. Dengan kondisi belum adanya sistem yang mempermudah akses petani/peternak untuk berhubungan dengan bank, Departemen Pertanian bersama dengan Bank Komersial dan Bank Syariah telah meluncurkan Skim Kredit/Pembiayaan yang baru dengan nama Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3) yang khusus membiyai usaha pertanian skala mikro dan kecil mulai dari usaha hulu, budidaya maupun usaha hilir.

Dalam pelaksanaan pelayanan SP-3, Bank pelaksana bertindak sebagai Executing Bank dengan kata lain bank akan menyalurkan dananya sendiri yang berasal dari dana pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan, sehingga secara pronsip bank akan memberikan kredit/pembiayaan kepada petani/peternak yang mempunyai usaha yang layak.

Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3) merupakan skim khusu yang dibentuk oleh Bank bersama Depaartemen Pertanian yang dikhususkan petani/peternak yang mempunyai usaha yang layak tidak mempunyai cukup agunan sesuai persyaratan penbankan. Untuk membantu petani yang kekurangan agunan tersebut maka Departemen Pertanian akan memberikan fasilitas jasa penjamin (pembayar jasa penjamin/premi) dan bagi resiko, sehingga bank dapat memberikan kredit/pembiayaan kepada petani/peternak sasaran SP-3.

Penggunaan Kredit/Pembiayaan

Penggunaan kredit SP-3 adalah untuk Usaha Sangat Mikro (UMI), Kredit Usaha Mikro (UM II), Kredit Usaha Kecil I (UK I) dan Kredit Usaha kecil II (UK II) dengan target dan sasaran petani/peternak yang berada dalam skala usaha mikro dan kecil, dengan plafon/limit kredit:

1. Usaha Sangat mikro (UM I) dengan plafon di bawah Rp 10 juta
2. Kredit Usaha Mikro (UM II) dengan limit di atas 10 juta sampai dengan Rp 50 juta
3. Kredit Usaha Kecil I (UK I) dengan limit di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta
4. Kredit Usaha Kecil II (UK II) dengan limit di atas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta.

Fasilitasi SP-3

Fasilitasi SP-3 yang dapat dimanfaatkan oleh petani/kelompok tani/ gabungan kelompok tani yang sudah disetujui oleh bank pelaksana maupun Lembaga keuangan mikro (LKM) Perdesaan untuk mendapatkan kredit/ pembiayaan SP-3 adalah sebagai berikut :

1. Kredit/Pembiayaan SP-3 skala usaha sangat mikro (UM I) yang disalurkan Lembaga Keuangan mikro (LKM) perdesaan jejaring Bank Pelaksana difasiltasi oleh Sp-3 melalui pencadangan Resiko Kredit sanpai 90%. UM I TIDAK menggunakan fasilitas Lembaga Penjamin.
2. Kredit/Pembiayaan SP-3 skala Usaha Mikro II (UMII), Usaha Kecil I (UKI) dan Usaha Kecil II (UKII) dalam bentuk Kredit Investasi (KI) dan kredit modal Kerja (KMK) disalurkan langsung oleh Bank Pelaksana dengan menggunakan mekanisme SP-3 sebagai berikut :
   2.1. Pembayaran Jasa Penjamin maksimal sebesar 1,65% per tahun dari limit/plafon kredit/pembiayaan, yang dibayarkan kepada Lembaga Penjamin melalui Bank eplaksana (mandatory).

PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PERTANIAN

2.2. Pencadangan atas resiko kredit/pembiayaan skala Usaha Mikro II, usaha Kecil I dan Usaha Kecil II dengan pembatasan sebagai berikut ;

a. Pencadnagan 40% atas resiko lredit/pembiayaan Usaha mikro II (UMII) yang mempunyai limit diatas Rp 10 juta samapai dengan Rp 50 juta.
b. Pencadangan 30% atas resiko kredit/pembiayaan Usaha kecil I (UKI) yang mempunyai limit diatas Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta;
c. Pencadangan 10 % atas resiko/pembiyaan usaha kecil II (UKII) yang mempunyai limit diatas Rp 250 juta samapai dengan Rp 500 juta.

Tingkat Bunga dan Bagi Hasil

1. Tingkat bunga kredit yang dikenakan pada kredit/pembiayaan usaha mikro (UM II) dan Kredit usaha kecil (UK-I dan UK-II) adalah 2-3 % p.a lebih rendah dari suku bunga komersial yang berlaku di Bank pelaksana (floating rate).
2. Tingkat bunga kredit/pembiayaan yang dikenakan pada petani/ peternakan untuk kredit/pembiayaan usaha sangat mikro (UM I) maksimum setara dengan 12% p.a
3. Tingkat bagi hasil/keuntungan Bank pelaksana Syariah atas pembiayaan terhadap nasabah adalah :
   3.1 Untuk akad jual beli (murabahah dan salam) dan sewa (ijarah) diproyeksikan maksimal setara 15% 9lima belas persen) per tahun.
   3.2 Untuk akad bagi hasil 9mudharabah atau musyarakah) ekspektasi nisbah bagi hasil yang ditetapkan kepada nasabah lebih rendah dari keuntungan bagi hasil pembiayaan Bank pelaksana.
   3.3 Ketentuan bagi hasil/keuntungan tersebut akan ditinjau ulang apabila terjadi perubahan ketentuan di Bank pelaksana atau bank Indonesia.

Kredit/Pembiayaan SP-3 diperuntukan bagi petani/peternak sebagai nasabah/debitur yang mempunyai usaha tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan atau perkebunan secara :

a. Perseroaan/Individu
b. Berkelompok/Kelompok usaha
c. Gabungan Kelmpok yang berbadan hukum

meupun bukan berbadan hukum

Persyaratan:

1. Usaha pemohon minimal 21 tahun
2. Telah mejalankan usaha sebagai petani/peternak selama minimal 2 (dua) tahun dengan kondisi usaha :
   a. Usaha/komoditas yang diusahakan seudah mempunyai pasar
   b. Mempunyai prospek usaha dan trend laba yang stabil
   c. Usaha berbasis komoditas unggulan pertanian
3. Mengisi formulir aplikasi/proposal/RDKK dengan melampirkan :
   a. Pas Foto terbaru ukuran 3x4
   b. Fotokopi KTP pemohon (suami/istri)
   c. Fotokopi Kartu Keluarga dan surat nikah.

Suku Bunga

Suku bunga pinjaman sangat bersaing dengan kerangka bunga berada 2% sampai dengan 3 % dibawah suku bunga komersial yang berlaku di Bank Pelaksana SP-3.

Bank Pelaksana:

1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
2. Bank Syariah Mandiri
3. PT. Bank Bukopin Tbk
4. PT. Bank Pembangunan Daerah Nsa Tenggara Barat (Bank NTB)
5. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

B. Program BLM-KIP (Bantuan Langsung Masyarakat Untuk Keringanan Investasi Pertanian)

Calon Penerima BLK-KIP :

Kelompok sasaran yang dapat menerima dana BLM-KIP adalah :

1. Petani
2. Kelompoktani (POKTAN)
3. Gabungan Kelompoktani (GAPOKTAN)
4. Koperasi Pertanian (KOPTAN)

Mekanisme Penyalurab BLM-KIP :

Mekanisme penyaluran dana BLM-KIP mulai dari pemohonan samapi dana diterima kelompok sasaran dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1. Permohonan BLM-KIP Individual, yaitu permohonan untuk mendapat BLM-KIP yang dilakukan oleh kelompok sasara secara sendiri-sendiri. Apabila disetujui, BLM-KIP disalurkan langsung ke rekening pemohon (kelompok sasaran).
2. Permohonan BLM-KIP Kolektif, yaitu permohonan untuk mendapat BLM-KIP yang dilakukan oleh bank operasi atas nama para nasabahnya yang memenuhi syarat. Enyaluran BLM-KIP dilakukan melalui rekening bank operasi (bank pemohon) dan selanjutnya bank operasi meneruska ke masing-masing rekening nasabahnya yang ditetapkan sebagai penerima BLM-KIP.

Permohonan BLM-KIP Individual :

Lampiran Surat permohonan terdiri atas :

a. Bukti kredit/pembiayaan dari bank yang sah (apabila dalam bentuk fotocopy harus dilegalisir oleh bank operasi). Bukti kredit yang dimaksud adalah perjanjian kredit/pembiayaan atau surat keterangan pemberian kredit/pembiyaan dari bank opersi.
b. Fotocopy KTP yang masih berlaku (untuk perorangan).
c. Surat pernyataan penggunaan dana BLM-KIP bermaterai cukup.
d. Susunan pengurus dan struktur organisasi (untuk koperasi dan kelompok).

Selain sumber permodalan yang dikeluarkan dengan program pemerintah, sumber-sumber yang berasal dari perbankan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber-sumber pembiayaan Investasi terdiri dari :

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

1. Komersial:
   1.1 Perbankan
   1.2 Non Perbankan
2. Syariah
3. Program SKIM Kredit Ketahan Pangan (KKP)

Keterangan dari masing-masing sumber pebiayaan tersebut :

1. **Komersial**
   Salah satu sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan adalah Skim Kredit Komersial.

   1.1 Skim Kredit Komersial Perbankan
   Skim kredit komersial yang dapat dimanfatkan untuk pengembangan sector pertanian berbeda antara bank yang satu dengan bank yang lain.

A. PT Bank Negara Indonesia (BNI)

1. Kredit Usaha Kecil
   a. Penerima Kredit :
      Pengusaha Kecil termasuk didalamnya pelaku usaha di sector pertanian.
   b. Penggunaan kredit atau Jenis Usaha Yang Di Biayai:
      - Kredit untuk tujuan produktif
      - Untuk membiayaai barang modal (modal kerja) maupun untuk keperluan investasi (membeli/membangun toko, gudang, pembelian mesin, kendaraan niaga, dll)
      - Bidang usaha antara lain perdagangan, industri, jasa dan usaha lainnya yang layak untuk dibiayai.
   c. Maksimum dan jangka waktu kredit:
      - Maksimum kredit Rp 350 Juta
      - Besarnya kredit disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan pelunasannya
      - Self financial tidak diwajibkan, kecuali untuk keperluan investasi disesuaikan dengan ketentuan Bank BNI
      - Jangka waktu untuk jenis modal kerja (KMK) maksimum 1 tahun
      - Untuk jenis kredit investasi (KI), jangka waktu sesuai dengan ketentuan dan jenis yang di biayai

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

d. Bunga dan propisi
   - Tingkat suku bunga sesuai dengan rate/ketentuan yang berlaku di Bank BNI
   - Provisi 1% pa. Eenmalig

2. NON KUK

a. Penerima kredit:
   Pengusaha menegah

b. Penggunaan kredit:
   - Kredit untuk tujuan usaha/produktif
   - Untuk membiayai barang modal (modal kerja) maupun untuk keperluan investasi (membeli/membangun toko, gudang, pembelian mesin, kendaraan niaga, dll)
   - Bidang usaha antara lain perdagangan, industri, jasa dan usaha linnya yang layak untuk dibiayai.

c. Maksimum dan jangka waktu kredit
   - Maksimum kredit diatas Rp 350 juta s/d 5 Milyar
   - Besarnya kredit disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan pelunasan dari hasil usahanya
   - Self financing tidak diwajibkan, kecuali utuk keperluan investasi disesuaikan dengan ketentuan Bank BNI
   - Jangka waktu untuk jenis Modal Kerja (KMK) maksimal 1 tahun (dapat diperpanjang)
   - Untuk jenis investasi (KI), jangka waktu sesuai dengan ketentuan dan jenis investasi yang dibiayaai

d. Bunga dan Propisi
   - Tingkat bunga sesuai rate/ketentuan yang berlaku di Bank BNI
   - Propsi 1% pa. Enmating

e. Kredit Mikro
   Kredit mikro adalah fasilitas kredit yang keperluan produktif atau konsumtif yang diberikan kepada pengusaha kecil yang mempunyai penghasilan cukup dan dapat dipergunakan sebagai alternative sumber pembiayaan kredit.

f. Target Pasar:
   Masyarakat mikro dengan penghasilan antara Rp 25.000 s/d Rp 625.000/hari

g. Maksimum Kredit:
   Fitur 1 : Maksimum Rp 10 juta
   Fitur 2 : Maksimum Rp 25 juta
   Fitur 3 s/d 5 : Maksimum Rp 50 juta

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

h. Jangka waktu :
   Maksimum 3 (tiga) tahun
i. Suku bunga:
   1.8 % s/d 2% pb

B. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

1. KUPEDES (Kredit Umum Pedesaan)
   a. Jenis-Jenis Kupedes:
      1) Kupedes Modal Kerja Sektor Pertanian
      2) Kupedes Investasi Sektor Pertanian
   b. Penerima Kredit
      Kupedes diberikan kepada perorangan atau perusahaan yang usahanya layak untuk dengan Kupedes, Yaitu:
      - Golongan Pengusaha : Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri dan Jasa
      - Golongan berpenghasilan tetap: Pemua Pegawai Negeri, Pensiunan, Pegawai perusahaan swasta.
   c. Jenis Usaha yang dibiayai:
      Kupedes dapat membiayi semua jenis usaha seperti pertanian, perdagangan, industri, jasa dan lain-lain yang layak dan mempunyai prospek bagus dan tidak bertentangan dengan peraturan, undang-undang, kesusilaan, agama, adat dan lingkungan hidup.
   d. Suku Bunga:
      Bunga Kupedes adalah komersial (suku bunga pasar) dihitung dari besarnya maksimum kredit mula-mula dan dibebankan sepanjang jangka waktu kredit (Flat rate system).

2. Kredit Kecil Investasi (KKI) dan Kredit Kecil Modal Kerja (KKM) s/d Rp 350 Juta.
   a. Penerima Kredit
      Penerima kredit KKI dan KKM adalah pengusaha kecil pada semua sector usaha yang produktif.
   b. Jenis usaha yang dibiayai:
      Skim Kredit KKI dan KKM dapat membiayai semua jenis usaha kecil:
      - Jenis usaha yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
      - Usaha lain yang menurut penilaian BRI tidak layak.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

c. Suku Bunga:
   Suku bunga skim kredit KKI dan KKM adalah komersial
d. Jangka waktu kredit:
   Sesuai dengan musim usaha
e. Jangka waktu maksimum:
   - KKI = 5 tahun, dengan grace periode maksimum 12 bulan
   - KKM s/d 50 Juta = 24 bulan
   - KKM Rp 50 juta s/d Rp 350 juta = 36 bulan
f. Kredit wajib diangsur tiap bulan, dua bulan atau tiga bulan
g. Angsuran sesuai dengan cash flow usaha

3. Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja (KMK)
   a. Penerima Kredit :
      Skim kredit ini ditunjukan untuk pembiyaan usaha yang produktif
   b. Jenis usaha yang dibiayai:
      Skim KI dan KMK dapat membiayai semua jenis usaha kecuali:
      - Jenis usaha yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
      - USaha lain yang menurut penilaian BRI tidak layak.
   c. Suku bunga :
      Suku bunga skim KI dan KMK adalah komersial
   d. Jangka waktu kredit :
      1. Sesuai dengan siklus/musim usaha
      2. Jangka waktu maksimum:
         - KI = 5 tahun, dengan grace periode sesuai analisa
         - KMK= 36 bulan
   e. Angsuran pokok wajib diangsur tiap 1-6 bulan
   f. Angsuran sesuai dengan cash flow usaha

4. Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE)
   a. Penerima kredit:
      Penerima kredit Modal Kerja Ekspor adalah ekportir
   b. Jenis usaha yang dibiayai
      Seluruh atau sebagian kegiatan dalam rangka ekspor mulai dari kegiatan produksi barang ekspor mulai dari kegiatan produksi barang ekspor sampai dengan negosiasi (pengambilalihan/pencarian wesel

PERPUSTAKAAN NASIONAL KEMENTERIAN PERTANIAN

ekspor). Kegiatan produksi barang ekspor meliputi seluruh tahap proses produksi mulai pengadaan stock sampai dengan menjadi barang siap ekspor, hingga pelaksanaan ekspor.

c. Suku Bunga :
Suku bunga skim kredit KMKE adalah komersial

C. PT. Bank Danamon

1. Kredit Usaha Kecil (KUK)

a. Besar Kredit :

1) KUK Mikro : mulai dari Rp 50 juta s/d Rp 1 Milyar

2) KUK Dasar : > Rp 50 juta s/d Rp 100 juta

3) KUK Prima : > Rp 100 juta s/d Rp 350 juta

b. Jenis usaha :
Diberikan kepada semua sector ekonomi, meliputi sector : Pertanian, Industri, Perdangan dan Jasa dan Ekonomi lainnya.

c. Syarat Pemberian:

1) KUK Mikro:

a. Calon debitur yang dapat dilayani:
- Individu, ada persetujuan suami-istri bagi debitur yang sudah kawain
- Badan hukum
- Kelompok usaha

d. Lama Usaha :
- Debitur perorangan minimum 1 (satu) tahun
- Debitur badan usaha minimum 6 (enam) bulan
- Debitur kelompok minimum 3 (tiga) bulan

c. Jangka Waktu Kredit :
- Modal kerja : Maksimum 1 (satu) tahun
- Investasi : Maksimum 5 (lima) tahun

d. Suku Bunga :
Suku Bunga komersial yang berlaku di pasar

2). KUK Dasar

a. Debitur :
- Individu, ada persetujuan suami-istri bagi debitur yang sudah kawin
- Badan hukum
- Kelompok usaha

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

b. Lama Usaha :
   - Debitur perorangan min 1 (satu) tahun
   - Debitur badan usaha min 6 (enam) bulan
   - Debitur kelompok min 3 (tiga) bulan

c. Jangka Waktu Kredit :
   - Modal kerja : Max 1 (satu) tahun
   - Investasi : Max 5 (lima) tahun

3) KUK Prima

a. Debitur :
   - Individu, ada persetujuan suami-istri bagi debitur yang sudah kawin
   - Badan hukum
   - Kelompok usaha

b. Lama usaha :
   - Debitur perorangan min 1 (satu) tahun
   - Debitur badan usaha min 6 (enam) bulan
   - Debitur kelompok min 3 (tiga) bulan

c. Jangka waktu kredit :
   - Modal kerja : Max 1 (satu) tahun
   - Investasi : Max 5 (lima) tahun

d. Suku bunga :
   Suku bunga komersial yang berlaku di pasar

2. Fasilitas Two Step Loan (TSL)

1) Jexim Ajdf (Asean Japan Development Fund)
   - Plafon kredit : Rp 100 juta - Rp 200 juta
   - Kredit debitur : Usaha produktif
   - Jangka waktu kredit : Investasi = 3-7 tahun (Grace periode: 2 tahun)
   - Bidang usaha : Non Manufacturing
   - Suku bunga : sesuai dengan kondisi pasar wilayah

2) Jexim Japan Vi
   - Plafon kredit : Rp 20 juta - Rp 350 juta
   - Kredit debitur : Usaha produktif
   - Jangka waktu kredit : Investasi max 8 tahun (Grace periode : 3 tahun)
   - Bidang usaha : semua sector Ekonomi
   - Suku bunga : sesuai dengan kondisi pasar wilayah

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

3). IBRD-AFP (Agriculture Financing Project)

- Plafon kredit : Max Rp 3,5 Milyar
- Kredit Debitur : Usaha produktif
- Jangka waktu kredit : Investasi max 8 tahun
- Bidang usaha : Sektor Pertanian, Industri hasil Pertanian, Jasa-jasa terkait dengan sector pertanian.

3. Kredit Program

a. Krecit Kepada Pengusaha Kecil dan menegah

- Plafon kredit :
  - Investasi : Max Rp 25 juta
  - Modal kerja : Max Rp 5 juta
  - Modal Kerja terkait investasi : Max Rp 30 juta, dengan ketentuan modal kerja yang dapat diberikan maksimum sebesar kredit investasi yang disetujui
- Kredit Debitur :
  - Kekayaan debitur max Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
  - WNI
  - Berdiri sendiri (bukan anak perusahaan)
  - Bentuk usaha perorangan, tidak berbadan hukum
  - Memakai teknologi sederhana
  - Syarat kelompok : jumlah anggota 5 s/d 15 orang dan masing-masing melakukan kegiatan usaha produktif, mempunyai pengurus aktif, mempunyai aturan kelompok, bersedia membuka tabungan kelompok dan ditempatkan pada bank penyalur dan minimum mempunyai pembukuan sederhana.
- Jangka waktu kredit :
  - Modal kerja = 1 tahun
  - Investasi = 5 tahun
- Bidang usaha : semua sector ekonomi
- Suku bunga : 16 % p.a termasuk imbalan untuk kelompok - 1% p.a
- Jaminan :
  - Kelayakan usaha yang dibiayai
  - Surat sanggup bayar hutang dari debitur perorangan/kelompok

b. Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya

PERPUSTAKAAN DIREKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

- Plafon kredit :
  - Masing-masing anggota koperasi max Rp 50 juta
  - Pembiayaan modal kerja di sector perdagangan & jasa max Rp 10 juta/anggota
- Koperasi Primer untuk diteruskan kepada anggotanya guna membiayai usaha produktif anggota koperasi
- Jangka waktu kredit :
  - Modal kerja = 1 tahun
  - Investasi max = 15 tahun
  - Modal kerja terkait investasi max = 5 tahun
- Bidang usaha : Semua sector ekonomi
- Suku bunga : 16 % p.a
- Jaminan :
  - Kelayakan usaha yang dibiayai
  - Surat sanggup bayar hutang dari debitur perorangan / kelompok

D. PT Bank Central Asia

1. Kredit lokal (pinjaman Rekening Koran)
   a. Penerima kredit :
      Semua calon debitur yang memenuhi persayatan BCA
   b. Jenis usaha yang dibiayai :
      Semua sector usaha produktif
   c. Plafon kredit :
      Sesuai kebutuhan kredit calon debitur
   d. Suku bunga kredit :
      Suku bunga komersial sesuai ketentuan BCA
   e. Jangka waktu : 1 (satu) tahun dapat diperpanjang

2. Time Loan (Pinjaman Berjangka)
   a. Jenis Time Loan :
      1. Revolving
      2. Insidentil
   b. Penerima kredit :
      Semua calon debitur yang memenuhi persyaratan BCA
   c. Jenis usaha yang dibiayai :
      Semua sector usaha produktif
   d. Plafon kredit :
      Sesuai kebutuhan kredit calon debitur

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

e. Suku bunga kredit :
   Suku bunga kredit adalah suku bunga komersial sesuai ketentuan BCA
f. Jangka waktu
   Maksimum 1 (satu) tahun dapat diperpanjang. Khususnya untuk Time Loan Isidentil, jangka waktu maksimum 6 bulan, tidak dapat diperpanjang.

3. Installment Loan (Pinjaman angsuran)
   a. Penerima kredit :
      Semua calon debitur yang memenuhi persyaratan BCA
   b. Jenis usaha yang dibiayai :
      Semua sector usaha produktif
   c. Plafon kredit
      Sesuai kebutuhan kredit calon debitur
   d. Suku bunga kredit :
      Suku bunga komersial sesuai ketentuan BCA
   e. Jangka waktu:
      Max : 3 tahun

4. Kredit Ekspor
   a. Penerima kredit :
      Semua calon debitur yang memenuhi persyaratan BCA
   b. Jenis usaha yang dibiayai :
      Semua sector usaha produktif
   c. Plafon Kredit :
      Sesuai kebutuhan calon kredit debitur
   d. Suku bunga kredit :
      Suku bunga kredit komersial sesuai ketentuan BCA
   e. Jangka waktu :
      Max 1 tahun, dapat diperpanjang

5. Kredit Impor
   a. Penerima kredit :
      Nasabah/debitur BCA yaneg membuka Sight L/C melalui BCA
   b. Jenis usaha yang dibiayai :
      Semua sector usaha produktif
   c. plafon kredit :
      Sesuai kebutuhan calon kredit debitur

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

d. Suku bunga kredit
Suku bunga kredit komersial sesuai ketentuan BCA
e. Jangka waktu :
Max 1 tahun

E. PT Bank Mandiri

1. Kredit modal Kerja :
   a. Tujuan Penggunaan :
      - Pedagang ekpor
      - Perdagangan Dalam negeri
      - Industri :
        Teksil dan perajutan, Logam dasar, Ban dan bahan karet, Obat-obatan, pengolahan bahan kimia, Makanan dan Minuman, Film, Plastik, Kayu dan Pengolahannya, Kertas, Bahan bagunan, Crumn rubber dan remling, Kayu lapis, Kapur, Pakan ternak, Pengolahan hasil tambang.
      - Perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan
      - Prasarana dan jasa

   b. Jangka waktu kredit :
   Jangka waktu kredit sesuai dengan jenis dan sifar kredit, umumnya max 12 bulan

   c. Plafon :
   Disesuaikan dengan kebutuhan proyek yang akan dibiayai

   d. Suku bunga
   Tingkat bunga kredit komersial, sesuai dengan ketentuan Bank Mandiri

2. Kredit Investasi
   a. Tujuan penggunaan :
   Untuk membiayai pengadaan barang modal

   b. Jangka waktu dan tenggang waktu kredit
      - Termasuk didalamnya masa tenggang yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan membayar kembali atas dasar cash flow proyek
      - Masa tanggung waktu (Grace Period) adalah periode waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bank kepada debitur, untuk

PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PERTANIAN

penangguhan angsuran pokok kredit atau pembayaran bunga atau angsuran pokok beserta bunga sesuai dengan perjanjian kredit s/d waktu tertentu.

- Availibility period : masa/periode dalam waktu tertentu dimana limit seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila tidak/belum menarik limit seluruhnya, maka terhadap sisa plafon kredit (yang belum ditarik/unused portion) akan dibatalkan (cansel)

c. Flafon kredit
Disesuaikan dengan kebutuhan biaya proyek yang akan dibiayai

d. Bunga kredit
Tingkat bunga kredit komersial, sesuai dengan ketentuan Bank Mandiri

3. Kredit Usaha Kecil

a. Tujuan penggunaan :
Untuk membantu permodalan baik dalam bentuk KI dan atau KMK yang diberikan kepada debitur usaha kecil dengan limit max Rp 350 juta (dalam Rp dan Va) untuk usaha produktif

b. Jangka waktu kredit
- Jangka waktu KI, KUK max 10 tahun dengan grace periode max 2 tahun
- Jangka waktu KMK, KUK konstruksi sesuai jangka waktu penyelesaian proyek

c. Plafon kredit
Disesuaikan dengan proyek yang akan dibiayai, plafon kredit antara Rp 350 juta s/d Rp 25 milyar

d. Bunga kredit
Tingkat bunga kredit komersial, sesuai dengan ketentuan Bank Mandiri

4. Trade Finance

a. Tujuan Trade Finance :
- Memberikan fasilitas penundaan pembayaran impor (import finance) serta jaminan pembayaran hasil ekspor kepada nasabah untuk kebutuhan modal kerja perusahaan.
- Sebagai sarana untuk mempelancar ekspor-impor dan menunjang peningkatan ekspor.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

b. Jenis Kredit Trade Finance :
   - Trade Finance Cash Loan
   - Trade Finance Non Cash Loan

c. Jangka waktu :
   Jangka waktu kredit max 1 tahun (umumnya 6 bulan). Jangka waktu per transaksi

d. Suku bunga :
   - Penentuan suku bunga kredit didasarkan kepada tingkat bunga pasar menurut jenis, sifat dan jangka waktu kredit
   - Tingkat bunga kredit komersial, sesuai dengan ketentuan Bank Mandiri

F. PT Bank BUKOPIN

1. SWAMITRA
   - Plafon : Rp 1 juta s/d 50 juta
   - Jangka waktu : 1 thn - 3 thn
   - Kegunaan : Untuk modal kerja usaha
   - Tingkat bunga : 30 % per thn (dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar)

2. Kredit Usaha Kecil (Small Scale Credit)
   - Plafon : Rp 50 juta s/d Rp 1 milyar
   - Kegunaan : Untuk semua usaha
   - Tingkat bunga : 19% - 21% per tahun (dapat berubah sesuai kondisi pasar)

3. Kredit bisnis agrobisnis
   - Plapon : Diatas Rp 1 milyar s/d BMPK Bank Bukopin
   - Kegunaan : Untuk usaha dalam bidang yang terkait dengan pertanian
   - Tingkat bunga : 19% - 21% pertahun (dapat berubah sesuai kondisi pasar)

I.2 Skim Kredit Komersial Non Perbankan

I.2.a Kemitraan BUMN

a. Kemitraan BUMN :
   Program kemitraan BUMN dengan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

b. Besarnya dana :
Besarnya dana pemninaan adalah lebih besar dari 1% dan max 3% setelah mempertimbangkan likuiditas perusahaan.

c. Suku bunga pinjaman :
- Tingkat bunga diberlakukan menurun (sliding) dan ditetapkan oleh Direksi BUMN lebih rendah dari tingkat bunga kredit komersil perbankan dengan memperhatikan kelayakan usaha mitra binaan.
- Suku bunga sekitar 6% per tahun untuk pinjaman sampai Rp 50 juta dan untuk pinjaman di atas Rp 50 juta suku bunga sebesar 6-12%. Suku bunga pinjaman max 12% per tahun dengan system perhitungan bunga efektif
- Pinjaman diatas Rp 100 juta harus dikoordinasikan ke PUKK Pusat.

d. Jangka Waktu pinjaman :
Jangka waktu pinjaman untuk jenis usaha yang sama agar dibahas antara BUMN Koordinator dengan BUMN Pembina untuk diperoleh kesepakatan agar tidak terjadi perbedaan jangka waktu pinjaman.

e. Bidang usaha yang di danai :
Pertanian, perikanan, pengrajinan tradisional, pangan, industri ringan, perdagangan, jasa dan sector informal

1.2.b Ansuransi Pertanian

a. Ansuransi Pertanian : untuk memberikan proteksi atau penggantian terhadap risiko penurunan hasil baik sub sector tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, sebagai akibat serangan hama dan penyakit tanaman, organisme pengganggu tanaman, penyakit hewan dan bencana alam.

b. Premi :
Besarnya premi asuransi kerugian tanaman pertanian adalah sebagai berikut:
- Full coverage (hama, penyakit, organisme pengganggu tanaman dan bencana alam) sebesar 5% dari nilai kredit yang diberikan oleh perbankan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

- Serangan hama, penyakit dan OPT sebesar 2,2% dari nilai kredit.
- Bencana alam (banjir, kekeringan, gempa bumi dan angina topan) sebesar 2,8% dari nilai kredit

c. Kepersertaan:
Yang menjadi peserta dalam asuransi kerugian tanaman pertanian adalah petani yang menerima kredit dari perbankan.

d. Periode pertanggungan:
Jangka waktu asuransi (pertanggungan) adalah 1 (satu) kali masa tanam yaitu selama max 6 (enam) bulan (sejak menerima kredit).

1.2.c Modal Ventura

a. Modal Ventura adalah suatu jenis pembiayaan berupa penyertaan modal dalam jangka waktu tertentu oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) baik perorangan, kelompok, maupun usaha berbadan hukum dengan pola pembagian keuntungan yang akan ditentukan bersama oleh PMV dan PPU.

b. Besar penyertaan modal ventura (PMV) kepada PPU Agribisnis :
- Pada saat ini jumlah penyertaan modal ventura yang dapat disediakan oleh PMV daerah max Rp 100.000.000,-
- Untuk penyertaan modal Ventura diatas Rp 100.000.000,- PMV daerah akan mengadakan kerjasamaa dengan PT. Bahana Artha Ventura Jakarta.
- Modal Ventura yang didanai oleh PT Bahana Artha Ventura min Rp 100.000.000,-
- Kebutuhan dana tersebut diperuntukkan min 50% untuk investasi dan sisanya untuk modal kerja, apabila kebutuhan investasi kurang dari 50% maka asset dapat di refinancing.

c. Jangka waktu Kerja sama:
Jangka waktu kerja sama antara PMV dengan PPU Agribisnis biasanya antara 3-6 tahun.

d. Jenis usaha yang dapat dibiayai dengan modal ventura :
- Modal kerja seperti pupuk, benih, bibit tanaman obat-obatan, dll
- Modal investasi seperti peralatan, dll.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

1.2.d. Kredit Tunda Jual Gabah

- Kredit tunda jual gabah adalah pembiayaan yang diberikan oleh Perum Pengadaian degan gabah milik nasabah sebagai barang jaminan.
- Gabah adalah Gabah Kering Giling (GKG) dengan standar kualitas SNI.
- Jumlah max kredit yang dapat diberikan dihitung berdasarkan harga taksira pasar GKG hari itu.

2. Pembiayaan Syariah

Perbankan syariah dapat melayani berbagai jenis pembiayaan untuk berbagai keprluan, dari kebutuhan konsumtif sampai dengan modal kerja usaha, mapun modal investasi bahkan ekspor-impor.

Jenis-jenis pembiayaan itu antara lain:

- Murabah : Jual beli dengan pembayaran lunas/angsuran.
- Salam : Jual beli dengan penyerahan yang ditangguhkan.
- Isthisna : Jual beli dengan pesanan.
- Mudharabah : Bagi hasil/investasi usah.
- Musyarakah : Usaha besama/kerjasamaa modal.
- Ijarah : Sewa atau leasing.

3. Program SKIM Kredit Ketahan Pangan (KKP)

a. Tujuan : Untuk peningkatan ketahanan pangan nasional dan sekaligus peningkatan pendapatan petani dan peternak, melalui penyediaan kredit investasi dan atau modal kerja dengan tingkat bunga yang terjangkau.

b. Ketentuan Pokok Kredit Ketahan pangan (KKP):

- Usaha dan Komoditi yang dibiayai KKP
  KKP untuk membiayai (1) petani, dalam rangka intensifikasi padi, jangung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar dan pengembangan budidaya tebu, (2) peternakan, dalam rangka peternakan sapi potong, sapi perah, ayam buras, ayam ras, dan itik (3) petani ikan, dalam rangka budidaya ikan dan atau bersama-sama dengan usaha budidaya peternakan ayam buras dan (4) pengadaan pangan padi, jagung dan kedelai.
- Suku bunga KKP adalah suku bunga pasar (komersial) yang berlaku pada Bank Pelaksana yang bersangkutan dikurangi subsidi bunga yang diberikan pemerintah.

PERPUSTAKAAN SEKJEN DITJEN
KEMENTERIAN PERTANIAN

Perkembangan Suku Bunga KKP

Uraian	1 Agut 2003 s/d 31 Juli 2004	Mulai 1 November 2005
1. Lending Rate	18%	18%
2. Subsidi Bunga:		
- Tanaman Pangan	9 %	9 %
- Peternakan	5 %	6 %
- Perkebunan	5 %	9 %
- Pengadaan Pangan	5 %	6 %
- Perikanan	5 %	6 %
3. Suku Bunga KKP		
- Tanaman Pangan	9 %	9 %
- Peternakan	13 %	12 %
- Perkebunan	13 %	12 %
- Pengadaan Pangan	13 %	12 %
- Perikanan	13 %	12 %

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN